

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- A. A. Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Djambatan 2008).
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi P, *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Edi Praoto, *Antimoni Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*, (Bandung: CV. Utomo, 2006).
- Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002).
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Imam Sutiknjo, *Politik Hukum Agraria*, (Jogjakarta : Gajah Mada University Press, 1990).
- Lexy .J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2004).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- PT. Kereta Api (Persero), *Tanah Kereta Api Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara*, (Semarang: Seksi Hukum PT. Kereta Api (Persero), 2000).
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2000).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984).

_____ dan Siti Mamudji, *Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994).

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan Milik Belanda.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah – Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok – Pokok Pelaksanaan Undang – Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan Milik Belanda.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta – Api dan Tilpon Milik Belanda.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api.

Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok – Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak – Hak Barat.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan – ketentuan Kebijakan Selanjutnya.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. Jurnal/Karya Ilmiah/Majalah/Internet :

Antara Lampung, “Sekilas Tentang Aset PT KAI (Persero) Wilayah Sumatera”, diakses dari <http://bumn.go.id/keretaapi/berita/1-SekilasTentang-Aset-PT-KAI-Persero-WilayahSumatera->, pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 20.00.

Astika Sari R, *Sistem Reservasi dan Pelayanan Tiket Kereta Api Berbasis Online Pada PT.KAI (Persero)DAOP IV Semarang (Stasiun Semarang Poncol)*, (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 2019).

Chaynel Lumendek dkk, *Konflik Hak Guna Bangunan dalam Kebijakan Pertanahan di Kawasan Pesisir Pantai Kelurahan Malalayang II Kecamatan Malalayang Kota Manado*, (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Volume 1 No. 1 Tahun 2018).

Eddy Sukmana dkk, *Grow Together in Harmony*, OnTrack, Edisi Spesial Hari Ulang Tahun Ke-73 KA, September 2018.

Hernawan Santosa dkk, *Analisis Hukum Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah Perkeretaapiaan Indonesia (Studi Putusan Peninjauan Kembali No : 125 PK/Pdt/2014)*, Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017 “ Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 Tahun 2014” Hotel Sahid Jaya Surakarta, Sabtu,8 April 2017, Universitas Islam Batik Surakarta.

Nevey Varida A, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, (Jurnal RechtsVinding, Volume 1 No. 2, Agustus 2012).

- Nurchamin, “Peta Belanda “Kalahkan” Sertifikat Tanah”, diakses dari <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang-raya/semarang/2019/07/29/peta-belanda-kalahkan-sertifikat-tanah/>, pada tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 20.00.
- Oky Nasrul, *Pemanfaatan Tanah Aset PT. Kereta Api oleh Pihak Ketiga*, (Jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, Desember, 2018).
- PT. Kereta Api Indonesia, “Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum”, diakses dari <http://bumn.go.id/keretaapi/berita/1-Keabsahan-Grondkaart-di-Mata-Hukum>, pada tanggal 16 Ferburari 2020 pukul 19.00.
- PT. Kereta Api Indonesia, “Sejarah Perkeretaapian”, diakses dari https://kai.id/corporate/about_kai/, pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 21.00.
- Purna, “Kemijen: Monografi Dalam Kata”, diakses dari <https://pekakota.or.id/kemijen-monografi-dalam-kata/>, pada tanggal 11 mei 2020 pukul 18.23.